

SKRIPSI

**PEMBUATAN KLAIM KEWARGAAN (*CITIZEN CLAIM MAKING*) PADA
MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

MIFTAHUL KARIMA

E041191001

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMBUATAN KLAIM KEWARGAAN (*CITIZEN CLAIM MAKING*) PADA
MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MIFTAHUL KARIMA

E041191001

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal : Januari 2024

Menyetujui

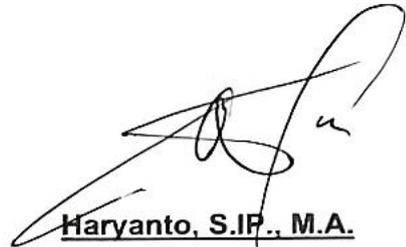
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 196212311990031023

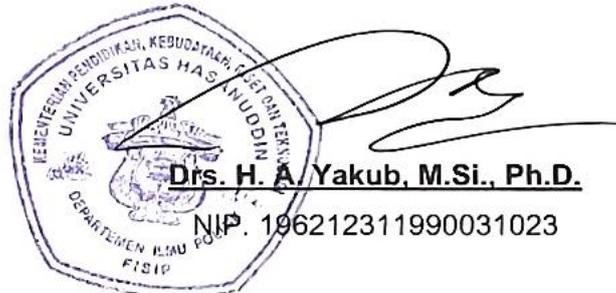


Haryanto, S.IP., M.A.

NIP. 198610082019031009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PEMBUATAN KLAIM KEWARGAAN (*CITIZEN CLAIM MAKING*) PADA
MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MIFTAHUL KARIMA

E041191001

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A.

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Karima
NIM : E041191001
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembuatan Klaim Kewargaan (*Citizen Claim Making*) pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2024



STAMP: 10000
METERA
TEMPEL
DF8C9AKX785355104

MIFTAHUL KARIMA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembuatan Klaim Kewargaan (*Citizen Claim Making*) pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Hasan Sofyan dan Ibu Surdiana yang telah menjadi orang tua terhebat yang senantiasa memberi nasihat, dukungan, memberi kasih sayang yang tak terhingga, dan memberi segalanya yang takkan bisa penulis balas. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa yang terbaik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis

ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si. beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D. yang telah memberikan dukungan, semangat, dan apresiasi kepada penulis. Sekaligus pembimbing utama yang telah membantu,

memudahkan, dan memberikan kelancaran dalam menulis skripsi, serta membimbing penulis dari awal proposal hingga ujian akhir.

7. Sekretaris Departemen Ilmu Politik, Bapak Haryanto, S.IP., M.A. sekaligus pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak bahan bacaan sebagai referensi dalam menulis skripsi dan membimbing penulis untuk menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir. Juga mendukung, memberikan semangat, dan mengapresiasi setiap pencapaian prestasi maupun pengembangan diri penulis.
8. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zuhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T. dan Ibu Musriati S.E. yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
10. Tim Pengelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., Direktur Pendidikan Ibu Risma Illa Maulany, S.Hut., M.NatRest., Ph.D., Kasubdit Pembelajaran Mandiri Ibu Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D., Bapak Aspar Usman, S.E., MM., Kak Mutmainnah, S.S., Kak Silviana, S.Hut., Kak Muh. Arif Wicaksono, S.T., Kak Syamsul Bahri, S.E. M.M., yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi Duta MBKM Universitas Hasanuddin dan bergabung menjadi bagian dari tim pengelola MBKM. Banyak pengalaman, pembelajaran, dan buah hasil dari proses yang penulis dapatkan dari kesempatan ini.

11. Pemerintah Desa Aeng Batu-Batu, Ibu Kepala Desa, Syarifa Ratu Yuliani, S.Pd. dan khususnya masyarakat nelayan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2019 yang telah kebersamai, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses perkuliahan. Terkhususnya Andi Aisyah Mujahida, Tarisa Rahmadani, Joy Charis Baan, Adinda Mutia Cahyani, Dhea Aulia, dan Reski Erik Sandi. Semoga sukses dalam karir dan pendidikan selanjutnya.
13. Sahabat penulis yang telah menemani diwaktu suka maupun duka dalam perkuliahan, Megan, Risda, Rista, Riri, Shila, Fadel dan Irfan. Memberikan dukungan, bantuan, bimbingan kepada penulis. Terima kasih atas tawa, canda, sedih, dan energi positifnya, semoga kelak

menjadi orang yang sukses dalam karir, pendidikan, dan bermanfaat bagi orang lain.

14. Teman-teman Duta MBKM Unhas serta seluruh mentor dan volunteer PMM 3 dan 4. Terima kasih telah mewarnai masa akhir perkuliahan penulis, berproses bersama, dan menyukseskan kegiatan MBKM. Tetap jaga silaturahmi, dan selalu mengingat hadin dan kebersamaan Life at Rektorat Lantai 7.
15. Teman-teman organisasi BEM Universitas Hasanuddin, HMI Komisariat Isipol Unhas, Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas, UKM Fotografi Unhas, UKM Softball-Baseball Unhas, UKM Ledhak Unhas, UKM Basis Fisip Unhas, dan UKM Prisma Fisip Unhas.
16. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 108 IPM Takalar 3 terkhususnya teman posko penulis, Ihsan, Atiqah, dan Dewi yang mengisi hari-hari penulis selama masa KKN, memberikan bantuan, dukungan, serta bersama-sama menyukseskan program kerja dengan baik.
17. Kakanda Arina Nandayu Budiman Armin, S.IP. mentor sekaligus kakak yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis sehingga diberikan ruang untuk berkembang dan turut andil dalam proses pencapaian yang penulis raih.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, masukan, dan apresiasinya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, Februari 2024

MIFTAHUL KARIMA

ABSTRAK

Miftahul Karima E041191001. Pembuatan Klaim Kewargaan (*Citizen Claim Making*) pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar. Di bawah bimbingan Andi Yakub sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.

Pembuatan klaim sebagai tindakan langsung atau termediasi yang dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan akses terhadap barang dan jasa kesejahteraan sosial, yang dipahami sebagai sumber daya yang disediakan publik untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial. Pembuatan klaim sangat penting sebagai sarana potensial untuk mendapatkan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu dalam mengajukan klaim atas bantuan sosial kepada pemerintah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan dengan melihat bahwa peneliti telah mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai informan terkait. Serta studi kepustakaan sebagai data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan berita.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu menggunakan konsep langsung dan tatap muka dengan cara mengunjungi kantor desa ketika ingin mengajukan permintaan bantuan dan bertemu langsung dengan pemerintah desa. Hanya sebagian menggunakan mediator sebagai perantara, dan sebagian lainnya memilih untuk tidak melakukan pembuatan klaim. Nelayan cukup aktif berpartisipasi dalam pengajuan klaim, ini merupakan elemen penting dari kewarganegaraan aktif memperjuangkan hak seseorang dalam bernegara.

Kata kunci : Pembuatan Klaim, Nelayan, Bantuan Sosial, Partisipasi

ABSTRAC

Miftahul Karima E041191001. Citizen Claim Making in the Fisherman Community in Takalar Regency. Under the Guidance of Andi Yakub as the Main Supervisor and Haryanto as the Assistant Supervisor.

Claim making is defined as a direct or mediated action undertaken by citizens to gain access to social welfare goods and services, understood as publicly provided resources to protect and improve welfare and social security. Making claims is very important as a potential means of obtaining social assistance. This research aims to identify how the fishing community in Aeng Batu-Batu Village submits claims for social assistance to the government.

The type of research used is qualitative descriptive research using data collection techniques such as interview techniques, observation, and documentation. This was done by seeing that the researcher had obtained information directly by interviewing related informants. As well as literature studies as secondary data sourced from books, journals, articles, and news.

The results of this research show that the majority of fishing communities in Aeng Batu-Batu Village use the direct and face-to-face concept by visiting the village office when they want to submit a request for assistance and meeting directly with the village government. Only some use mediators as intermediaries, and others choose not to make claims. Fishermen are quite active in participating in filing claims; this is an important element of active citizenship in fighting for one's rights in the state.

Keywords: Claim Making, Fisherman, Social Assistance, Participation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Konsep Kewarganegaraan.....	14
2.3 Claim Making	18
2.4 Kerangka Berpikir	20
2.5 Skema Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Informan Penelitian.....	27

3.6	Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		31
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Takalar	31
4.1.1	Kondisi Geografis	31
4.1.2	Kondisi Demografi	31
4.1.3	Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya	33
4.1.4	Data Kemiskinan Penduduk Kabupaten Takalar	35
4.1.5	Bantuan Sosial.....	36
4.1.6	Perumahan.....	37
4.1.7	Data Nelayan	39
4.2	Gambaran Umum Desa Aeng Batu-Batu.....	39
4.2.1	Kondisi Geografis	39
4.2.2	Kondisi Demografi	40
4.2.3	Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya	40
4.2.4	Masalah Kemiskinan Desa Aeng Batu-Batu.....	42
4.2.5	Bantuan Sosial.....	42
4.2.6	Perumahan.....	43
4.2.7	Data Nelayan	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
5.1	Cara Masyarakat Nelayan dalam Mengajukan Klaim	45
5.1.1	Langsung dan Tatap Muka.....	46
5.1.2	Melalui Mediator.....	65
5.1.3	Repertoar (Gerakan/Aksi).....	69
BAB VI PENUTUP		74
6.1	Kesimpulan	74
6.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jenis Perahu Nelayan Desa Aeng Batu-Batu	4
Gambar 1.2 Permukiman Nelayan Desa Aeng Batu-Batu	5
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Takalar Tahun	
2013-2022	35
Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Keluarga	
Sejahtera (KKS) di Kabupaten Takalar Tahun 2022	37
Gambar 4.3 Statistik Perumahan Kabupaten Takalar Tahun 2022	38
Gambar 4.4 Kondisi Rumah di Pesisir Pantai Galesong (Aeng Batu-Batu)	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Topik yang diklaim oleh masyarakat nelayan Desa Aeng	
Batu-Batu	48

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Syarifata Ratu Yuliani, S.Pd.	84
Dokumentasi 2. Rajeng Dg. Rewa	84
Dokumentasi 3. Ilyas Dg. Lilla	85
Dokumentasi 4. Anto Dg. Bunga	85
Dokumentasi 5. Kamaruddin Dg. Duni	86
Dokumentasi 6. Muh. Ilham Dg. Sanrang	86
Dokumentasi 7. Ilham Dg. Tola	87
Dokumentasi 8. Dg. Tarru	87
Dokumentasi 9. Saripuddin Dg. Nurung	88
Dokumentasi 10. Suardi Dg. Pasang	88
Dokumentasi 11. Arham Dg. Ngeppe	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.¹

Negara sebagai pusat kehidupan masyarakat menyediakan dan menyalurkan sumber daya untuk kebutuhan dasar dengan melibatkan serangkaian kebijakan, program, dan layanan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terpenuhi terhadap kebutuhan dasar mereka.

Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat memperoleh akses untuk mendapatkan sumber daya publik yang disalurkan pemerintah karena dalam kondisi struktural warga negara memiliki perbedaan dalam keterlibatan dan pendekatan kepada negara untuk mengejar atau mengajukan klaim atas sumber daya publik. Beberapa masyarakat menyuarakan keinginannya kepada

¹ Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73.

pemerintah, sementara yang lainnya mencari alternatif pribadi, dan yang lainnya lagi tetap diam dalam menghadapi kekurangan. Mayoritas masyarakat miskin terus berjuang untuk mengakses sumber daya negara dengan mencoba menjembatani kesenjangan ini dengan membuat klaim pada negara atas barang dan jasa kesejahteraan sosial.

Kecenderungan untuk menjembatani kesenjangan dengan mengajukan klaim kepada negara merupakan aktivitas produk dari keterpaparan masyarakat terhadap pengetahuan, harapan, dan keterkaitan dengan negara. Tindakan warga dalam hal ini dipicu oleh negara dan diproduksi secara sosial, dibentuk oleh pertemuan langsung dengan pejabat publik dan oleh laporan warga lain yang beredar di dalam dan di luar komunitas lokal. Aktivitas klaim seseorang akan mencerminkan sejauh mana ia dibatasi oleh batas-batas sosial dan spasial (misalnya, kelas, etnis, gender, dan lokalitas) yang membatasi pergerakan orang dan arus informasi. Batasan yang lebih longgar, yang memungkinkan keterpaparan yang lebih besar terhadap negara, mendorong tindakan warga negara dan batas-batas yang lebih kaku, sebaliknya justru menghambat.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek utama adalah nelayan karena dianggap sebagai kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi. Berbagai hasil kajian penelitian selama ini tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah mengungkapkan bahwa sebagian besar mereka tergolong nelayan buruh atau

nelayan-nelayan kecil. Kemampuan mereka memenuhi kehidupan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan dan papan.² Disusul dengan kebutuhan yang menunjang profesi sebagai nelayan seperti perahu atau kapal, mesin, dan alat tangkap.

Dibanding profesi lainnya, nelayan salah satu kelompok sosial atau komunitas yang selama ini terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik dan teridentifikasi miskin dan terendah pendapatannya di samping petani sehingga wajar orang mengistilahkan mereka sebagai *the poorest of the poor*. Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan.³

Desa Aeng Batu-Batu terletak pada kecamatan galesong utara kabupaten takalar, wilayah geografisnya berada di pesisir pantai galesong sehingga aktivitas keseharian penduduknya bertumpu pada laut dan mayoritas berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh, penduduk Aeng Batu-Batu pada tahun 2021 yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 70% disusul petani dan wiraswasta.⁴ Tingkat pendapatan masyarakat nelayan juga rata-rata

² Muyarto dkk, 1984; Kusnadi, 2002.

³ Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2018.

⁴ Dg. Nambung (staf desa), hasil wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2023.

masih rendah belum terlalu tinggi, hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁵

Masyarakat Aeng Batu-Batu sebagian besar bekerja sebagai nelayan buruh dan nelayan perorangan dengan persoalan utama masih bergelut pada garis kemiskinan.⁶ Penyebab kemiskinan pada nelayan khususnya di Desa Aeng Batu-Batu dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural disebabkan perahu bukan milik sendiri, kurangnya hasil tangkapan, kurangnya keberpihakan dari pemerintah desa. Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh pola hidup konsumtif, sikap pasrah pada keadaan, dan rendahnya teknologi penangkapan ikan.⁷

Gambar 1.1 Jenis Perahu Nelayan Desa Aeng Batu-Batu (dokumentasi pribadi)



Gambaran kondisi nelayan terlihat dalam kehidupan yang terbatas secara materi, rumah dan pemukiman yang kurang berkualitas. Komunal

⁵ Dg. Nambung (staf desa), hasil wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁶ Sianipar & Pinem, 2017; Suryaningsi, 2017.

⁷ Syarif & Maddatuang. (2023). Dinamika Kemiskinan Nelayan. Hal 23-35.

nelayan dengan mudah dikenali sebagai masyarakat kekurangan dari rumah-rumah mereka. Rumah sederhana dan terkadang jauh dari kata layak.

Berdasarkan hasil observasi penulis, permukiman nelayan di Desa Aeng Batu-Batu masih banyak yang belum layak, hal ini dapat dilihat dari salah satu bangunan rumah kayu milik seorang nelayan yang atap/sengnya sudah terlepas serta rapuhnya kayu yang terlihat semakin memperparah kondisi rumah. Apabila musim hujan tiba, kondisi permukiman semakin diperparah dengan adanya dampak abrasi akibat pengerukan pasir di pesisir pantai galesong yang terjadi sepanjang tahun 2018-2020,⁸ hal ini mengakibatkan penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai sehingga memperbesar resiko bencana.⁹

Gambar 1.2 Permukiman Nelayan Desa Aeng Batu-Batu (dokumentasi pribadi)



Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan

⁸ Arbi Ahmadi. 2023. Double Burden, Tambang Pasir Laut Galesong Kabupaten Takalar.

⁹ Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2022. Mengenal Bahaya Abrasi.

kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian banyak nelayan di Desa Aeng Batu-Batu hanya mengenyam pendidikan hingga tamatan SD.¹⁰

Padahal pengembangan kesejahteraan pada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa yang bertanggung jawab mengenai kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah desa setempat dan warga desa wajib mendapat pemberdayaan lebih khusus pada kelompok – kelompok nelayan. Dimana pemerintah desa aeng batu-batu harus memperhatikan kesejahteraan kelompok nelayan yang ada didaerahnya.

Adapun tuntutan akses kebutuhan yang sifatnya publik mengarah kepada situasi yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Aeng Batu-Batu yaitu pemberian bantuan peralatan nelayan seperti alat tangkap (jaring, pancing, pukot) yang digunakan untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Bantuan pengadaan kapal atau perahu untuk kelompok nelayan miskin sejumlah 6-12 orang beserta bantuan pengadaan mesin untuk

¹⁰ Dg. Nambung (staf desa), hasil wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2023.

nelayan perorangan. Bantuan sembako dan bantuan renovasi rumah bagi nelayan yang rumahnya sudah tidak layak huni dan diperparah oleh dampak abrasi akibat pengerukan pasir di pesisir pantai galesong.

Hal yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki nelayan terkait cara mengakses dan mengklaim bantuan sosial, juga mempertanyakan bagaimana masyarakat nelayan dapat mengakses pendanaan layanan tersebut yang merujuk pada upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak, kesejahteraan, atau keberlanjutan hidup, karena nelayan juga berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara.

Mengingat realita yang terjadi dilapangan berbagai kebijakan yang diberikan dalam pelaksanaannya seringkali tidak seimbang, kesempatan yang sama tidak didapatkan serta keikutsertaan masyarakat dalam program kebijakan yang tidak merata. Sulit dan rendahnya akses terhadap bantuan sosial juga pengetahuan mengenai hal ini masih terbatas atau masih kurang dikalangan nelayan, kurangnya kekuatan (*power*) yang dimiliki sehingga perlu melihat bagaimana cara pembuatan klaim (*claim making*) yang dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk mengakses sumber daya yang disediakan oleh negara dalam hal ini terkait kebutuhan yang mendukung aktivitas nelayan seperti bantuan perahu, mesin, alat tangkap, sembako, dan renovasi rumah.

Apakah pemerintah desa merespon tuntutan terhadap kebutuhan nelayan terkait hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraannya atau

tidak. Adakah kehadiran negara dalam hal ini memberikan akses pendanaan dan penyaluran layanan bantuan sosial tersebut serta mengklaim nelayan sebagai warga negara untuk terlepas dari situasi kemiskinan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Aeng Batu-Batu.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pembuatan Klaim Kewargaan (*Citizen Claim Making*) pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah “Bagaimana cara masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu dalam mengajukan klaim atas bantuan sosial (perahu, mesin, alat tangkap, sembako, dan renovasi rumah) kepada pemerintah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu dalam mengajukan klaim atas bantuan sosial (perahu, mesin, alat tangkap, sembako, dan renovasi rumah) kepada pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan sumber literatur bagi penelitian kedepannya yang berkaitan dengan ruang

lingkup penelitian sehingga menjadi pengembangan sarana pembelajaran lebih lanjut serta nilai tambah dalam mengkaji isu klaim kewargaan pada warga negara khususnya di masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam informasi pemahaman dan pemikiran yang disajikan sebagai bahan bacaan bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai Pembuatan Klaim Kewargaan. Serta menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang Pembuatan Klaim Kewargaan pada profesi lainnya di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan, konsep serta teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan pembuatan klaim kewargaan (*citizen claim making*) pada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar yang selanjutnya dalam hal ini akan menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan menjadi referensi serta perbandingan dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan konsep kewarganegaraan, pembuatan klaim (*claim making*), dan skema penelitian yang akan digunakan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian tentang “Pembuatan Klaim Kewargaan (*Citizen Claim Making*) pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar” penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan referensi serta perbandingan untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis secara teori maupun konseptual. Penelitian terdahulu juga menjadi bahan pertimbangan untuk menghindari duplikasi, menyampaikan posisi studi dan menunjang penelitian penulis terkait dengan pembuatan klaim kewargaan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Jurnal yang ditulis oleh Lalli Metsola dengan judul “Incremental dependencies: Politics and ethics of claim-making at the Fringes of Windhoek, Namibia”. Jurnal ini membahas melalui kasus studi tentang klaim dan tanggapan inkremental dan saling konstitutif oleh penduduk Namibia dari pemukiman informal dan otoritas publik, penelitian ini telah mempertanyakan penerapan umum dari interpretasi dinamika pembuatan klaim yang berfokus pada perlawanan, otonomi, atau klienalisme instrumental. Dalam konteks Namibia, klaim cenderung mencerminkan dan membangun etika relasional saling ketergantungan. Ini menyoroti pentingnya spesifisitas kontekstual. Proses pembuatan klaim cenderung secara bersamaan tentang barang, sumber daya, atau manfaat konkret dan tentang inklusi. Pembuatan klaim penduduk di Namibia tidak mewakili perpanjangan hak atau mendemokratisasikan politik secara langsung. Sebaliknya, modus operandinya merekonstruksi hubungan ketergantungan timbal balik. Namun, negosiasi ini memang mewakili keinginan mendalam untuk keadilan sosial dan ekonomi dan inklusi dalam badan politik nasional. Sementara kemajuan nyata yang terkait dengan pembuatan klaim dan tanggapan penduduk terbatas dan daya tahannya tidak pasti, kebijakan dan praktik inkrementalitas partisipatif mencerminkan dan membantu merekonstruksi cita-cita otoritas publik responsif yang melampaui utilitas instrumental langsung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diego Maiorano dari University of Singapore dengan judul “The Politics of Claim-Making in India” pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dari sebagian besar masyarakat di dunia, fakta bahwa akses ke layanan esensial sering kali bergantung pada akses ke orang yang tepat tentu menjadi perhatian utama bagi prospek pembangunan India. Di sisi lain, bagaimanapun, orang biasa, dengan satu atau lain cara, mendapatkan akses ke layanan, jika tidak melalui jaringan patronase, maka melalui akses langsung ke perwakilan. Ini memang, seperti pendapat Bussell, suatu bentuk akuntabilitas demokratis yang merupakan elemen penting dari demokrasi patronase India.
3. Buku dengan judul “Europeanization and Minority Political Agency” pada bab yang tulis oleh Szabolcs Pogonyi dengan topik “Europeanization of Kin-Citizenship and the Dynamics of Kin-Minority Claim-Making: The Case of Hungary” pada tahun 2019. Artikel ini mengeksplorasi implikasi kebijakan kekerabatan terhadap pengajuan klaim minoritas lintas batas. Untuk menunjukkan implikasi kewarganegaraan kekerabatan terhadap strategi pengajuan klaim minoritas, artikel ini menyelidiki bagaimana penerapan kewarganegaraan ekstrateritorial dan hak suara di Hongaria telah mempengaruhi potensi pengajuan klaim oleh partai-partai minoritas Hongaria di negara-negara tetangga. Artikel tersebut berpendapat

bahwa, berlawanan dengan teori-teori yang ada, peningkatan aktivisme negara melalui kewarganegaraan ekstrateritorial tidak selalu mengarah pada radikalisasi kelompok minoritas, namun hal ini membahayakan potensi mobilisasi dan strategi klaim aktor-aktor politik lintas batas di negara asal mereka. negara bagian. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa meningkatnya aktivisme negara-kerabat tidak serta merta meningkatkan ketegangan antarnegara dan antaretnis.

4. Jurnal yang ditulis oleh Stale Angen Rye dari Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology dan Nanang Indra Kurniawan dari Department of Politics and Governments, Universitas Gadjah Mada dengan judul "Claiming indigenous rights through participatory mapping and the making of citizenship" pada tahun 2017. Jurnal ini membahas bagaimana pemetaan partisipatif, melalui gagasan masyarakat adat, terlibat dalam pembentukan lembaga politik peserta dan kemungkinan implikasinya terhadap perjuangan lokal atas tanah dan sumber daya adat. Secara empiris, makalah ini mengacu pada studi lapangan mengenai pemetaan partisipatif sebagai strategi hukum kartografi untuk pengakuan hak adat atas tanah dan sumber daya masyarakat Dayak, sebuah kelompok etnis asli di Kalimantan Tengah, Indonesia. Dalam makalah ini, kami menggunakan kewarganegaraan sebagai dasar analisis kami. Berdasarkan hal ini, kami membahas bagaimana gagasan tentang masyarakat adat telah mengumpulkan

aktor-aktor dari berbagai skala dan bagaimana hal ini memungkinkan masyarakat adat berkembang sebagai tempat untuk mengklaim hak-hak adat atas tanah dan sumber daya melalui pemetaan partisipatif. Salah satu argumen utama kami adalah perlunya memahami kewarganegaraan masyarakat adat sebagai suatu proses yang berkembang seiring berjalannya waktu dan melalui jaringan aktor yang melampaui batas-batas negara dan memperluas hubungan yang tadinya eksklusif antara negara dan warganya dalam pembentukan kewarganegaraan. Kami menentang perbedaan jelas yang dikemukakan Isin antara pendekatan aktif dan pendekatan aktivis dalam mengajukan klaim kewarganegaraan, dengan menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan ini bersifat konstitutif.

Dari keempat penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu melihat bagaimana claim making yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemangku kebijakan dalam hal ini negara untuk mengklaim hak-hak mereka. Yang jadi pembeda pada penelitian ini adalah subjek masyarakat, penelitian ini menganalisis bagaimana cara masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar dalam mengajukan permintaan (*claim*) atas barang dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka kepada pemerintah setempat terutama pemerintah desa.

2.2 Konsep Kewarganegaraan

Konsepsi kewarganegaraan memiliki banyak perspektif pengertian. Perbedaan pengertian cenderung dilekatkan kepada disiplin apa yang memberikan pendefinisiannya. Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada keanggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum (regal). Dari penjelasan itu, kewarganegaraan selalu dilekatkan kepada persoalan identitas politik kewarganegaraan dan status hukum seseorang sebagai warga negara.¹¹

Sejumlah ilmuwan memberikan definisi yang tegas dan menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua aliran atau tradisi besar: liberal dan republikan.

Teori dalam tradisi liberal ini juga berpendapat bahwa warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Perspektif ini bercirikan penekanan pada individu dan berbasis pada hak. Peter H Schuck dalam *Liberal Citizenship* (2002), menyatakan bahwa pengaruh besar dari teori ini diawali oleh penjelasan secara sistematis melalui John Locke. Menurut Locke (1993), individu dianugerahi dan dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam dan berupa hak-hak alamiah. Individu sebelumnya hidup dalam alam alamiah, kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat politik. Teori Locke tentang

¹¹ Soeseno, 2010: 23.

kepemilikan (Locke's theory of property) menyebutkan ada tiga elemen sentral bagi kewarganegaraan liberal.¹² Pertama, individu dapat menciptakan kekayaan atau kepemilikan dan menambah dominasi kepemilikan itu melalui kerja. Kedua, perlindungan terhadap kepemilikan merupakan fungsi utama hukum dan pemerintahan dan Ketiga, pelaksanaan yang sah menurut hukum atas hak-hak kepemilikan secara alamiah menghasilkan ketidakmerataan yang adil.

Sumber utama tradisi kewarganegaraan Liberal adalah karya-karya yang ditulis oleh T.H Marshall sesudah perang dunia kedua dalam buku *Citizenship and Social Class* (1950) yang mengkonseptualisasi kewarganegaraan atas dasar tiga hak yaitu: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup perlindungan individu untuk bebas yaitu kebebasan berbicara, berkeyakinan, berhak atas keadilan. Hak politik mencakup hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial adalah hak atas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Tradisi republikan atau republik sipil sama tujuannya dengan sejarah perpolitikan itu sendiri. Secara umum, sumber-sumber tradisi kewarganegaraan republik sipil, bisa dibagi kedalam tiga periode. Tradisi kewarganegaraan yang bersumber dari (1) Masa Yunani dengan tokoh pemikiran dan sekaligus praktisi politik seperti Aristoteles (Yunani kuno), (2) Tokoh Romawi, dengan tokoh-tokohnya Cicero dan Machiavelli (Romawi), (3) Teori awal negara modern dengan J.J Rousseau sebagai tokoh pemikirnya. Beberapa teoritis

¹² Locke, 1993: 113.

kontemporer seperti David Miller, Derek Heater merupakan pendukung utama tradisi republikan sipil ini. Meskipun para tokoh tersebut hidup pada era yang berbeda, sejumlah persamaan dapat ditafsirkan pada gagasan-gagasan atau dan pemikiran-pemikiran mereka tentang kewarganegaraan. Persamaan pemikiran atau gagasan di antara tokoh tersebut merupakan benang merah dalam melihat apa dan bagaimana tradisi kewarganegaraan republik sipil.¹³

Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai komunitas politik adalah pusat kehidupan politik. Kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil (*civic bonds*) suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual (tradisi liberal) ataupun ikatan kelompok (tradisi komunitarian). Sementara kewarganegaraan liberal lebih menekankan pada hak (*right*), sedangkan kewarganegaraan republikan menekankan pada kewajiban (*duty*) warganegara.

Pada kewarganegaraan republican kebebasan individu ada pada jaminan keamanan negara yang berada di bawah aturan hukum (*rule of law*) dan kebaikan warga negara tersebut dalam memberikan partisipasi. Maka dari itu, tradisi republican, kewarganegaraan memiliki dimensi etis dan legal hukum. Status hukum tiap warga negara berkaitan erat dengan kepemilikan privileges mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau

¹³ Soeseno, 2010: 52.

kepentingan publik. Oleh karenanya kewarganegaraan republican memerlukan komitmen aktif dalam urusan-urusan publik.¹⁴

2.3 Claim Making

Gabrielle Kruks-Wisner dalam bukunya yang berjudul “The Pursuit of Social Welfare Citizen Claim-Making in Rural India” mendefinisikan pembuatan klaim (*claim making*) sebagai tindakan langsung atau termediasi dimana warga mengejar akses ke barang dan jasa kesejahteraan sosial, dipahami sebagai sumber daya yang disediakan publik untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial.

Pengambilan klaim, sebagaimana didefinisikan di sini, terdiri dari tindakan warga negara dalam upaya memperoleh barang dan jasa kesejahteraan, yang secara luas dipahami sebagai sumber daya yang dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negara dan, khususnya, masyarakat miskin.¹⁵ Pembuatan klaim, menurut definisinya, ditargetkan oleh negara.¹⁶ Negara, dalam gaya weberian, dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang menjalankan kekuatan “sah” atas suatu wilayah yang telah ditentukan, dengan demikian mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak, mengatur, melakukan wajib militer, dan jika tidak, memaksa orang-orang di dalam wilayah tersebut. Hal ini juga, dalam gaya liberal klasik, merupakan penyedia barang publik yang kurang diproduksi oleh aktor swasta

¹⁴ Dagger, dalam Turner dan Isin, 2002: 147.

¹⁵ Here I build on Cammett and MacLean (2014, p. 6).

¹⁶ Globally, non-state service providers are increasing in both number and in type (Cammett & MacLean 2014).

dan pasar. Oleh karena itu, lembaga ini bertugas menjamin keamanan dan kesejahteraan publik. Namun negara bukanlah suatu kesatuan atau kesatuan yang kohesif; konturnya tidak jelas dan terus berubah, tampak berbeda bagi orang yang berbeda. Oleh karena itu, saya sengaja menggunakan gagasan yang longgar mengenai negara sebagai gabungan aktor, institusi, dan praktik yang melaluinya kekuasaan pemerintahan dijalankan dan sumber daya publik didistribusikan.¹⁷ Negara ada secara bersamaan di tingkat nasional, subnasional, dan lokal. Hal ini dibentuk dan diwujudkan oleh aktor-aktor tertentu (politisi, polisi, birokrat, dan pejabat di tingkat jalan atau desa), oleh lembaga-lembaga (kementerian, departemen, kantor daerah), melalui dokumen (akta kelahiran atau kematian, sertifikat tanah, sertifikasi), berdasarkan kebijakan (mulai dari perpajakan, wajib militer, hingga jaminan sosial), dan berdasarkan infrastruktur dan layanan (jalan, sekolah, rumah sakit, air, dan fasilitas lainnya).

Pengambilan klaim melibatkan upaya untuk mengarahkan aparatur kesejahteraan sosial negara: yaitu dengan melibatkan aktor, lembaga, dan institusi yang secara langsung dan tidak langsung membentuk penyediaan barang-barang tersebut.¹⁸ Hal ini, pada dasarnya, memerlukan perilaku mencari: melibatkan menghubungi, mengajukan petisi, atau mendekati pejabat publik atau perantara. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa barang kolektif dengan manfaat limpaan tinggi yang diterima seluruh kelompok dan daerah (misalnya, air minum komunal, jalan, sekolah, atau klinik kesehatan),

¹⁷ Here I follow Corbridge, Srivastava, and Veron (2005, p. 5).

¹⁸ Claim-making in pursuit of social welfare is one part of a broader array of practices that shape and reflect citizen–state relations.

serta barang-barang selektif dengan manfaat limpahan rendah bagi rumah tangga. atau individu (misalnya, jatah, bantuan tunai, pensiun, atau pekerjaan publik).¹⁹ Hal ini juga mencakup hak hukum dan barang yang dialokasikan dengan cara yang lebih diskresi – sebuah perbedaan yang sering menjadi bahan perdebatan karena seringnya pembelokan aturan membuat akses bahkan terhadap hak yang sangat tidak dapat diprediksi.

Oleh karena itu, pembuatan klaim dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang sering kali diperlukan namun seringkali juga tidak mencukupi: suara masyarakat jarang sekali cukup untuk menjamin penyediaan sumber daya publik, namun hal ini dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi penyediaan sumber daya tersebut.

2.4 Kerangka Berpikir

Pembuatan klaim kewargaan merupakan upaya untuk memperoleh barang dan jasa menyangkut kesejahteraan, yang secara luas dipahami sebagai sumber daya yang dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negara khususnya masyarakat miskin. Dalam hal ini adalah bantuan sosial seperti perahu, mesin, alat tangkap, sembako dan renovasi rumah yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Aeng Batu-Batu.

Dimana kehadiran negara sebagai pusat kehidupan masyarakat menyediakan dan menyalurkan sumber daya untuk kebutuhan dasar dengan

¹⁹ On the distinction between high- and low-spillover services, see Besley, Pande, and Rao (2004).

melibatkan serangkaian kebijakan, program, dan layanan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terpenuhi terhadap kebutuhan dasar.

Masyarakat nelayan dianggap sebagai kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi. Khususnya nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar masih bergelut pada garis kemiskinan. Kondisi masyarakatnya relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya informasi yang dimiliki nelayan terkait cara mengakses dan mengajukan klaim atas bantuan sosial kepada pemerintah desa membuat mereka tidak tahu bagaimana cara membuat dan mengajukan klaim agar dapat mengakses sumber daya yang disediakan oleh negara. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, lebih banyak menghabiskan waktu di laut, dan tidak memiliki kekuatan (power) untuk melakukan hal tersebut.

Sehingga perlu melihat proses bagaimana cara pengajuan klaim oleh masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu menggunakan tiga cara yaitu langsung, melalui mediator, dan melalui repertoar untuk mengklaim bantuan sosial (perahu, mesin, alat tangkap, sembako, dan renovasi rumah) kepada pemerintah desa dan anggota legislatif sebagai output dalam pengajuan klaim.

Pada penelitian ini, klaim bersifat bottom up (dari masyarakat nelayan kepada pemangku kebijakan).

Penulis menggunakan konsep kewarganegaraan dan claim making untuk melihat bagaimana proses/cara masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-Batu mengajukan klaim atas bantuan sosial kepada pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa ataupun anggota legislatif.

2.5 Skema Pemikiran

